

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENATAAN PEMASANGAN REKLAME LUAR RUANGAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh

Wildasari Siregar dan Dia Meirina Suri

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

The research is based on the principal issues concerning the billboard planning policy which has not optimally be able to improve the loca revenue of Pekanbaru City an has not improved the beauty of Pekanbaru City . It was estimated to be caused by the model of the billboard planning policy can not increase the billboard tax receipts as well as to enhance the visual beauty of Pekanbaru City. The method used in this research is descriptive quantative, which be able to improve the billboard tax planning policy implementation which be able to billboard tax receipts and to enhance the visual beauty of Pekanbaru City. The collection of data is used, as is common in quantitave research are observation, interviews and documentation. The research result indicated that (1) the billboard planning policy implementation running in the Pekanbaru City still not effective because of lack of attention to standards and pality objvetives and amplementing organizational characteristic are also not proved the role in billboard planning policy implementation in Pekanbaru City .(2) the model of billboard planning policy implementation of Pekanbaruun City mandated the regional revenue office of Pekanbaru City as the responsible agency for organizing and billboard planning in Pekanbaru City.

Keyword : Implementation, Policy, Billboard

ABSTRAK

Penelitian ini didasari pada masalah pokok mengenai kebijakan penataan reklame yang belum secara optimal dapat meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Pekanbaru dan belum meningkatkan keindahan Kota Pekanbaru. Hal ini diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan penataan reklame yang belum dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame sekaligus menambah keindahan visual pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kuantatif, yang bertujuan membangun implementasi kebijakan penataan reklame yang dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame serta menambah keindahan visual Kota Pekanbaru. Pengumpulan data yang digunakan, sebagaimana lazim dalam penelitian kuantitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Data yang terkumpul dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan penataan reklame yang berjalan di Kota Pekanbaru masih belum efektif karena kurang memperhatikan standard an tujuan kebijakan karakteristik organisasi pelaksana juga tidak terbukti berperan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru (2)Implementasi kebijakan penataan rekalmme di Kota Pekanbaru mengamanatkan Bapenda Kota Pekanbaru sebagai Lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan penataan diKota Pekanbaru.

Kata kunci : Pelaksanaan , Kebijakan, Reklame

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Berkembangnya pembangunan khususnya papan reklame, baliho, spanduk-spanduk iklan tentu saja harus ada kendali dari pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menerbitkan peraturan daerah untuk pengaturan dan penataan reklame. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan

wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Jika dilihat dari penataan kota masih banyak papan reklame yang manyalahi aturan yang di Kota Pekanbaru

mengakibatkan penataan kota dan keindahan kota tidak terlihat indah.

Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru Dalam Bab 1 pasal 1 mengartikan reklame adalah alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Untuk lebih jelasnya mengenai penyelenggaraan reklame terdapat pada pasal 7 yang berisi:

1. Izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan walikota
2. Sebelum izin ditertibkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, pemilik/penyelenggara atau kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi pajak reklame dan uang jaminan bongkar kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk
3. Uang jaminan bongkar pasang pemasangan reklame ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah ketetapan pajak

Ketentuan lanjut diatur dalam surat edaran dalam rangka kebijakan penataan reklame di Kota Pekanbaru dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru Bab I ketentuan umum pasal I sebagai berikut:

1. Kawasan / zona reklame adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

2. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara tambang aling atas bidang reklame dengan permukaan tanah/ permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri. Lokasi reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
4. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan kalender atau jangka yang diatur dengan peraturan walikota paling lama tiga bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
5. Media reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan/pendirian dan atau dimuatnya reklame dalam rangka penyelenggaraan reklame dimaksud.
6. Nilai sewa reklame yang disingkat (NSR) adalah hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame.
7. Nilai strategis pemasangan reklame yang disingkat (NSR) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
8. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estesis, baik dari segi kepentingan

peyelenggaraan, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru beserta lingkungan disekitarnya.

9. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungnya.
10. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian pemasangan pembuatan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggaraan reklame.

Reklame yang tidak diperbolehkan dipasang di jalan protokol yaitu reklame jenis rokok pemerintah secara tegas melarang pemasangan iklan zat adiktif di ruas jalan protokol. Larangan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah menerbitkan Surat Edaran 805/DPD/XII/2015 yang mengatur tentang larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam rangka pelaksanaan pasal 31 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 Tentang pengamanan Bahan yang mengandung Zat adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan juncto Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 88/menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan awasan Tanpa Rokok juncto Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru juncto Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lima ruas jalan yang dilarang untuk dipasang

iklan rokok tersebut adalah Jalan Jenderal Sudirman dari simpang Jalan Kharuddin Nasution sampai Jalan Hangtuah. Kemudian Jalan Pattimura mulai dari persimpangan Jalan Jenderal Sudirman sampai jalan Beringin. Selanjutnya, Jalan Tuanku Tambusai mulai dari simpang Jalan Jendral Sudirman sampai simpang Jalan KH. Ahmad Dahlan kemudian Jalan Riau mulai dari persimpangan Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Kulim. Terakhir Jalan Arifn Ahmad dimulai dari simpang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Paus.

Pelaksanaan

terhadap pemasangan reklame di Kota Pekanbaru badan pendapatan daerah Pekanbaru. Pelaksanaan yang efektif akan menyelesaikan tugas masing-masing secara lancar dan optimal namun demikian permasalahan di lapangan bertitik tolak dengan kenyataan, dilihat dari beberapa fenomena yang penulis temui terhadap pelaksanaan kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan di Kota Pekanbaru oleh badan pendapatan daerah Pekanbaru.

Sesuai dengan pengalaman penulis di lapangan, penulis menemui berbagai kendala/fenomena-fenomena antara lain :

1. Masih ada keberadaan reklame yang masih tidak tertata dengan baik ataupun tidak terpasang dengan baik yang dipasang ditiang-tiang dan dipasang dipohon.
2. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan masih banyak papan iklan atau reklame yang tidak memiliki izin tapi masih terpasang dan belum adanya pembongkaran atas papan reklame tersebut.
3. Selain reklame yang masih belum tertata dengan baik, dalam obsevasi juga ditemukan reklame yang

terpasang pada tempat yang terlarang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala sosial yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruang Di Kota Pekanbaru.
- b) Apa saja Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruang Di Kota Pekanbaru.
- c)

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan di Kota Pekanbaru.

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan di Kota Pekanbaru.

Kegunaan penelitian

- a) Kegunaan Teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi publik minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang kebijakan pada umumnya, dan investaris ilmu penelitian dibidang implementasi kebijakan.
- b) Kegunaan akaemis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c) Kegunaan praktis, hasil penelitian ini merupakan masukan dalam meningkatkan Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruang Di Kota Pekanbaru.

Studi Kepustakaan Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Siagian (2003;3) mengatakan bahwa unsur-unsur yang utama daalam administrasi adalah:

1. Dua orang manusia atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan
4. Sarana dan prasarana

Menurut Gie Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh segenap orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu (dalam Zulkifli & Moris 2014;14)

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (dalam Zulkifli,2009;71) organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan nama terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang kelompok orang yang disebut bawahan

Sedangkan Zulkifli (2009;71) sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian, wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Konsep Manajemen

Menurut Terry (2009;9) manajemen mencakup kegiatan untuk

mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing, dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian 2003;5)

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan dan mendorong SDM untuk bekerja sebagai patner dalam mencapai tujuan organisasi dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Disamping itu dapat dikatakan pengetian manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan Indrastuti dan Tanjung(2012;1)

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis. (samsudin. 2010;22).

Konsep Pelaksanaan

Siagian (2006;126) pelaksanaan tugasnya adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Terry dalam Syafii (2006;81) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mungusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Konsep Pelaksanaan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Mempelajari implementasi kebijakan public sangat krusial dan kompleks prespektif administrasi public dan kebijakan public, hal ini berkaitan dengan aspek kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas hubungannya dengan berbagai kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III, (1980;1).

Tachjan (2006;74), mengemukakan bahwa: Studi implementasi kebijakan publik pengembangannya dilatarbelakangi oleh pengalaman mengenai pelaksanaan program-program kebijakan pembangunan baik dinegara-negara dunia ketiga maupun dinegara maju, yaitu adanya perbedaan antar apa yang diharapkan tercapai dengan apa yang sesungguhnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Operasional Variabel

Tabel 1 : Konsep Operasional Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Dikota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Kategori
Implementasi Kebijakan Publik adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konskuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. (Edwards III,1980;1)	Analisis Pelaksanaan kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan dikota pekanbaru	1. Komunikasi	a. Mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan tentang pemasangan reklame b. Memberikan informasi pada pemasang reklame mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan. c. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan pemasangan reklame	-Baik -Cukup baik -Kurang baik
		2. Sumber daya	a. Menyediakan personil yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksana pemasangan reklame. c. Meyediakan anggran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan.	-Baik -Cukup baik -Kurang baik
		3. Disposisi	a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan terhadap pemasangan reklame. b. Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan c. Memberikan insentif bagi para pelaksana.	-Baik -Cukup baik -Kurang baik
		4. Struktur birokrasi	a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. b. Memberikan sanksi. c. Memiliki tanggung jawab untuk bekerja.	-Baik -Cukup baik -Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penulis 2017

Teknik Pengukuran

Adapun pengukuran masing-masing variable Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Baik : Apabila Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruang

Dikota Pekanbaru telah menjalankan 4 indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik dengan persentase 67%-100%.

Cukup baik : Apabila Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame LuarRuangan

DikotaPekanbaru telah menjalankan 3 indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup baik dengan persentase antara 34%-66%.

Kurang baik : Apabila Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame LuarRuangan Dikota Pekanbaru tidak menjalankan 1-2 indikator yang ada jawaban responden pada kategori kurang baik denganpersentase 0%-33%.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah kuantitatif, dan peneliti

Populasi dan Sampel

Tabel 2 Populasi dan Sampel Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Sub bidang pajak reklame	1	1	100%
2	Seksi pajak reklame	1	1	100%
3	Pegawai bagian sub bidang pajak reklame	26	26	100%
4	Masyarakat Wajib Pajak (WP) Kota Pekanbaru	6.000	50	0,82%
Jumlah		6.028	78	1.29%

Sumber : Data penelitian 2017

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengambilan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian serta menganalisisnya guna memperoleh berbagai data sekunder yang terkait dengan

memakai metode survey deskriptif yaitu sebagai peneliti yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, data deskriptif menggambarkan sesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya terjadi tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan di Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota pekanbaru khususnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pemilihan Dinas tersebut merupakan yang bertugas dan memiliki kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan di Kota Pekanbaru.

penelitian ini dengan alasan untuk mengetahui situasi dan kondisi pada objek penelitian.

2. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak yang berkaitan mengenai dan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai sumber data agar penulisan penelitian menjadi lebih lengkap dan valid.

3. Koesioner adalah dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternative jawaban yang ada.
4. Dokumentasi adalah cara yang biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia dan sebagainya. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui usaha pengumpulan sejumlah dokumen, arsip, video, foto, dan file lainnya yang diperoleh dari lapangan ataupun kantor Badan Pendapatan Daerah di jalan teratai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan Data Indikator Variabel Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Di Kota Pekanbaru.

1. Komunikasi

Tabel 3 : Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame dilihat dari Indikator Komunikasi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan tentang pemasangan reklame	20 (83%)	4 (16%)	-	24
2	Memberikan informasi pada pemasang reklame mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan.	19 (80%)	5 (20%)	-	24
3	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemasangan reklame	22 (91%)	2 (8%)	-	24
Jumlah		61	11	0	72
Rata-rata		20	4	0	24
Persentase		85%	15%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item pertanyaan yang penulis ajukan kepada Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame Kota Pekanbaru diketahui bahwa rata-rata responden menjawab baik Hal ini

dapat dilihat dari table diatas dimana sebanyak 20 orang atau sebesar 83% responden menjawab Cukup baik sebanyak 5 atau sebesar 20% dan responden yang menjawab Kurang baik tidak ada atau sama dengan nol (0).

Tabel 4 : Tanggapan Responden Wajib Pajak (WP) Reklame Kota Pekanbaru dilihat dari Indikator Komunikasi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan sosialisasi terhadap kebijakan tentang pemasangan reklame	12 (24%)	38 (76%)	-	50
2	Memberikan informasi pada pemasang reklame mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan.	11 (22%)	39 (78%)	-	50
3	Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemasangan reklame	5 (1%)	45 (9%)		50
Jumlah		28	122	0	150
Rata-rata		10	40	0	50
Persentase		19%	81%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan masalah komunikasi diantaranya masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bapenda bagian sub bidang reklame, air tanah, penerangan jalan dan mineral Kota pekanbaru sehingga informasi penting yang berkaitan

dengan masalah pemasangan aturan reklame belum sepenuhnya diterima oleh Wajib Pajak (WP). Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang lebih aktif agar segala hal yang berkaitan dengan kebijakan penataan pemasangan reklame dan sanksi yang diberikan terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak mematuhi dapat tersampaikan dengan baik.

2. Sumber Daya

Tabel 5 : Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame dilihat dari indikator sumber daya

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyediakan personil yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan	10 (41%)	7 (29%)	7 (29%)	24
2	Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksana pemasnagan reklame	-	3 (12%)	21 (87%)	24
3	Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan.	-	5 (20%)	19 (79%)	24
Jumlah		10	15	47	72
Rata-rata		3	5	16	24
Persentase		14%	21%	65%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item pertanyaan

yang penulis ajukan kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame Kota Pekanbaru diketahui bahwa rata-rata responden menjawab Kurang baik. hal ini dapat dilihat dari table diatas dimana responden menjawab baik

sebanyak 3 orang atau sebesar 14% responden menjawab Cukup baik 5 orang atau sebesar 21% dan sebanyak 16 orang atau sebesar 65% menjawab Kurang baik.

Tabel 6 : Tanggapan Responden Wajib Pajak Reklame Kota Pekanbaru dilihat dari indikator sumber daya

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Menyediakan personil yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan	35 (70%)	15 (30%)	-	50
2	Menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksana pemasangan reklame	45 (90%)	5 (10%)	-	50
3	Menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan.	-	5 (10%)	45 (90%)	50
Jumlah		80	25	45	150
Rata-rata		27	8	15	50
Persentase		53%	17%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan sumber daya, diantaranya adalah kurangnya pegawai untuk pengawasan terhadap masyarakat yang wajib Pajak dalam

pemasangan reklame sehingga dengan adanya personil yang turun kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan pemasangan reklame tersebut dapat tertangani supaya tidak ada pelaksana pemasangan reklame melanggar aturan tentang reklame.

3. Disposisi

Tabel 7 : Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilihat dari indikator Disposisi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan terhadap pemasangan reklame	18 (75%)	6 (25%)	-	24
2	Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan	15 (62%)	9 (37%)	-	24
3	Memberikan intensif bagi para pelaksana.	21 (87%)	3 (12%)	-	24
Jumlah		54	18	0	72
Rata-rata		18	6	0	24
Persentase		75%	25%	0%	100%

Sumber:Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item pertanyaan yang penulis ajukan kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame Kota Pekanbaru diketahui bahwa rata-rata responden menjawab baik hal ini

dapat dilihat dari table diatas dimana sebanyak 18 orang atau sebesar 75 % responden menjawab baik dan sebanyak 6 orang atau sebesar 25 % responden menjawab cukup baik dan responden yang menjawab kurang baik tidak ada atau sama dengan nol (0).

Tabel 8 : Tanggapan Responden Wajib Pajak Reklame Kota Pekanbaru dilihat dari indikator Disposisi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan terhadap pemasangan reklame	7 (14%)	43 (86%)	-	50
2	Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan	45 (90%)	-	5 (10%)	50
3	Memberikan intensif bagi para pelaksana.	20 (40%)	24 (48%)	6 (12%)	50
Jumlah		72	67	11	150
Rata-rata		24	22	4	50
Persentase		48%	45%	7%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item pertanyaan yang penulis ajukan kepada pegawai Wajib Pajak diketahui bahwa rata-rata responden menjawab baik hal ini dapat dilihat dari table diatas dimana

sebanyak 35 orang atau sebesar 70% responden menjawab baik dan sebanyak 11 orang atau sebesar 23% responden menjawab cukup baik dan sebanyak 4 orang atau sebesar 7% responden yang menjawab kurang baik.

4. Struktur Birokrasi

Tabel 9 : Tanggapan Responden Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilihat dari indicator Struktur Birokrasi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	20 (83%)	4 (16%)	-	24
2	Memberikan sanksi	19 (79%)	5 (20%)	-	24
3	Memiliki tanggung jawab dalam bekerja.	18 (75%)	6 (25%)	-	24
Jumlah		57	15	0	72
Rata-rata		19	5	0	24
Persentase		80%	20%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item pertanyaan yang penulis ajukan kepada pegawai

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak reklame Kota Pekanbaru diketahui bahwa rata-

rata responden menjawab baik hal ini dapat dilihat dari table diatas dimana sebanyak 19 orang atau sebesar 80% responden menjawab baik dan sebanyak

5 orang atau sebesar 20 % responden menjawab cukup baik dan responden yang menjawab kurang baik tidak ada atau sama dengan nol (0).

Tabel 10 : Tanggapan Responden Wajib Pajak Kota Pekanbaru dilihat dari indikator Struktur Birokrasi

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	13 (26%)	37 (74%)	-	50
2	Memberikan sanksi	20 (40%)	25 (50%)	5 (10%)	50
3	Memiliki rasa tanggung jawab	22 (44%)	28 (56%)	-	50
Jumlah		55	90	5	150
Rata-rata		18	30	2	50
Persentase		36%	60%	4%	100%

Sumber: Data Olahan 2018

Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap 3 item pertanyaan yang penulis ajukan kepada masyarakat wajib pajak diketahui bahwa rata-rata responden menjawab cukup baik hal ini dapat dilihat dari table diatas dimana

sebanyak 20 orang atau sebesar 40% responden menjawab baik dan sebanyak 28 orang atau sebesar 28 % responden menjawab cukup baik dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 orang atau sebesar 4%.

Table 11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame.

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	20 (83%)	4 (16%)	0 (0%)	24
2	Sumber Daya	3 (12%)	5 (24%)	16 (66%)	24
3	Disposisi	18 (75%)	6 (25%)	0 (0%)	24
4	Struktur birokrasi	19 (80%)	5 (20%)	0 (0%)	24
Jumlah		60	20	16	96
Rata-rata		15	5	4	24
Persentase		62%	21%	17%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangn Dikota

Pekanbaru. Dilihat dari indikator diatas total skor sejumlah 96 dengan kategori Baik. Berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hasil analisis

pelaksanaan kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan dikota pekanbaru adalah baik. Dan hal ini disebabkan karena sejauh ini pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame sudah diberikan arahan tentang bagaimana tata cara untuk melakukan tugas yang baik dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemasangan reklame dan memberitahukan segala aturan yang menyangkut dengan reklame.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame

Kota Pekanbaru sudah baik akan tetapi masih sebatas seperlunya saja seperti membahas peraturan Reklame, kemudian dalam hal pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame telah melakukan fungsinya akan tetapi belum baik, hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Sub Bidang Pajak Reklame masih rendah dalam sosialisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat wajib pajak bagaimana tata aturan tentang pelaksanaan pemasangan reklame dikota pekanbaru.

Table 12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden dari Wajib Pajak (WP)

No.	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	10 (20%)	40 (80%)	0 (0%)	50
2	Sumber Daya	27 (54%)	8 (16%)	15 (30%)	50
3	Disposisi	24 (70%)	22 (22%)	4 (8%)	50
4	Struktur birokrasi	18 (36%)	30 (60%)	2 (4%)	50
Jumlah		79	100	21	200
Rata-rata		20	25	5	50
Persentase		39%	50%	11%	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2018

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang analisis pelaksanaan kebijakan penataan pemasangan reklame luar ruangan dikota pekanbaru. Dilihat dari indikator diatas total skor sejumlah 200 dengan kategori cukup baik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hasil analisis pelaksanaan pemasangan reklame dikota pekanbaru kurang baik. Kondisi ini lah yang menjadi pemicu kebijakan Badan pendapatan daerah kota pekanbaru kurang maksimal. Hal ini

disebabkan karena kurangnya sosialisasi pegawai kepada masyarakat dan rendahnya sanksi yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada masyarakat yang melanggar aturan tentang pemasangan reklame

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Dikota Pekanbaru maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Pelaksanan Kebijakan Penataan Pemasangan Reklame Luar

Ruangan Dikota Pekanbaru yang dilihat dari 4 (empat) indikator diatas yaitu :

- a) Komunikasi dapat digolongkan dalam kategori Cukup Baik
 - b) Sumber Daya dapat digolongkan dalam kategori Baik
 - c) Disposisi dapat digolongkan dalam kategori Baik
 - d) Struktur Birokrasi dapat digolongkan dalam kategori Cukup Baik
2. Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait Analisis Pelaksanaan Penataan Pemasangan Reklame Luar Ruangan Dikota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
- a) Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada para Wajib Pajak (WP) Reklame Kota Pekanbaru
 - b) Masih minimnya sanksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Kepada para Wajib Pajak (WP) Reklame yang tidak mematuhi aturan dalam pemasangan reklame.
 - c) Minimnya kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) Reklame dalam melakukan pemasangan reklame supaya tidak asal-asalan dalam penataan pemasangan reklame.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan sosialisasi program oleh Bapenda Kota Pekanbaru kepada para Wajib Pajak (WP) Reklame Kota Pekanbaru, sehingga pemahaman masyarakat khususnya yang Wajib Pajak (WP)

Reklame bisa lebih memahami aturan dan sanksi yang berlaku terkait dengan penataan pemasangan reklame di Kota Pekanbaru.

2. Perlu adanya peningkatan pemberian sanksi oleh Bapenda Kota Pekanbaru Kepada Wajib Pajak (WP) Reklame yang melanggar aturan tentang penataan pemasangan reklame supaya tidak sembarang dalam pemasangan reklame
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) Reklame agar lebih mematuhi aturan yang sudah diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Penataan pemasangan reklame di Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Darmadi dan Damai, S. 2011. *Administrasi Public*. Yogyakarta: Laksbang
- Dewi, Irra Chistyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administasi*. Surabaya: Prestasi Pustaka
- Herujinto, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Grasindo. Jakarta.
- Hamim, 2003. *Adminitrasi, Organisasi Dan Manajemen, Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Pekanbaru: UIR Press
- Hamin, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Uir Press: Pekanbaru
- Haris Budiyo, Amirullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Melayu SP. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.

- Yogyakarta: Gajah Mada University
- Santoso, 2008, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ali Zaini, M, Si, 2015, *Teori Kebijakan Publik*, Marpoyan Tujuh
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syafi'i. Inu Kencana 2003 *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Silalahi. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Pulik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Thoha, Miftah, 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Terry R. George. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zulkifli.2005.*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.Pekanbaru: UIR Pers
- Zulkifli, Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Pasolong, Harbani,2007. *Teori Administrasi Public*. Bandung, Alfabeta
- Sunyoto, Danang, 2013. *Manajemen Sumber Daya Mansuia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Sujianto, 2008.*Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Praktek)* Alaf Riau. Pekanbaru
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta
- Ulbert Silalahi, 1992, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Syamsudin, Sadili,2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara
- Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Silam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR